

Orangtua di AS Harus Bayar Rp1 Miliar karena Buang Barang Porno Putranya

WASHINGTON (IM) - Pasangan orangtua di Amerika Serikat (AS) diperintahkan pengadilan untuk membayar USD75.000 atau lebih dari Rp1 miliar kepada putranya yang menang dalam gugatan. Pasangan orangtua itu digugat setelah membuang majalah dan DVD porno serta beberapa mainan seks yang berharga milik putra mereka.

Beth dan Paul Werking harus membayar putra mereka, David Werking, setelah dia memenangkan gugatan pada hari Rabu dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Paul Maloney.

Pasangan itu harus membayar sejumlah uang untuk mengganti kepemilikan barang-barang porno langka yang terdiri dari koleksi DVD, majalah, dan mainan seks.

"Ini karena terdakwa berulang kali mengakui bahwa mereka menghancurkan properti, dan mereka tidak membantah bahwa mereka menghancurkan properti tersebut," tulis Maloney dalam putusan tersebut, seperti dikutip Huffington Post, Senin (21/12).

Maloney juga menolak klaim Werking bahwa mereka telah memperingatkan putra mereka untuk tidak membawa majalah dan film porno ketika dia pindah ke rumah mereka setelah perceraian pada 2016.

The New York Post melaporkan bahwa ketika putranya pindah ke Indiana pada tahun 2017, dia melihat lusinan kotak harta "berharga" hilang setelah meminta mereka untuk mengirimkan barang-barang miliknya.

Belakangan terungkap bahwa orangtuanya telah membuang barang-barang tersebut. "Terus terang, David, saya sangat membantu Anda menyingkirkan semua hal ini," tulis ayahnya dalam email.

"Saya tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan kedalaman keterkejutan dan kekecewaan saya dan alasan saya menghancurkan pornografi Anda adalah untuk kesehatan mental dan emosional Anda sendiri," lanjut email tersebut.

"Saya akan melakukan hal yang sama jika saya menemukan satu kilo kokain crack." ● gul



VAKINASI VIRUS KORONA DI ISRAEL

Tim medis melakukan selebrasi sebelum menerima vaksin penyakit virus korona (Covid-19) saat Israel mulai mendorong vaksinasi virus korona, di Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov Hospital) di Tel Aviv, Israel, Minggu (20/12).

Arab Saudi Hentikan Penerbangan Internasional karena Gelombang Baru Pandemi Covid-19

Pemerintah Arab Saudi juga memutuskan untuk menerapkan tindakan pencegahan terkait munculnya strain baru Covid-19.

RIYADH (IM) - Otoritas terkait Arab Saudi menagihkan atau menghentikan seluruh penerbangan komersial internasional dan menagihkan pula perjalanan masuk ke Kerajaan melalui darat dan laut selama seminggu.

Penyebabnya adalah adanya gelombang baru pandemi virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 secara global dan munculnya strain baru Covid-19 yang bermutasi di Inggris dan negara Eropa lainnya.

Penangkuhan seluruh penerbangan komersial internasional oleh Arab Saudi itu diumumkan kantor berita negara, SPA, pada hari Minggu yang dilansir Al Arabiya, Senin (21/12).

Pembatasan perjalanan internasional yang baru merupakan tindakan pencegahan berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan sehubungan dengan munculnya mutasi Covid-19 baru.

Menurut WHO, varian virus corona baru, yang tampaknya telah meningkatkan penularan, telah mulai beredar

di Inggris. Di luar Inggris, sembilan kasus jenis baru telah dilaporkan di Denmark, serta satu kasus di Belanda dan satu lagi di Australia.

"WHO mencatat tanda-tanda awal bahwa varian mungkin dapat menyebar lebih mudah di antara orang-orang dan informasi awal bahwa varian tersebut dapat memengaruhi kinerja beberapa tes diagnostik," bunyi pengumuman WHO.

Nama ilmiah strain baru itu adalah VUI 202012/01, yang mana VUI adalah singkatan dari Variant Under Investigation.

Beberapa negara Uni Eropa seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, dan Belanda telah mengumumkan penangkuhan aktivitas transportasi udara, dan dalam

beberapa kasus transportasi kereta api dan feri, ke Inggris.

Pemerintah Arab Saudi juga memutuskan untuk menerapkan tindakan pencegahan terkait munculnya strain baru Covid-19.

"Tangguhkan semua penerbangan internasional untuk pelancong, kecuali dalam kasus luar biasa, dan harus menjalani tes virus korona selama isolasi dan mengulangi tes setiap lima hari.

"Semua individu yang telah kembali dari negara Uni Eropa atau negara mana pun di mana mutasi baru terdeteksi atau melewati salah satu negara transit selama tiga bulan terakhir, harus menjalani tes virus korona," lanjut perintah pencegahan tersebut. ● tom

darat dan laut selama satu minggu, yang dapat diperpanjang seminggu lagi."

Setiap individu yang telah kembali dari negara-negara Uni Eropa atau negara mana pun di mana mutasi baru terdeteksi, mulai dari 8 Desember, harus mengisolasi diri selama dua minggu sejak tanggal memasuki Kerajaan, dan harus menjalani tes virus korona selama isolasi dan mengulangi tes setiap lima hari.

"Semua individu yang telah kembali dari negara Uni Eropa atau negara mana pun di mana mutasi baru terdeteksi atau melewati salah satu negara transit selama tiga bulan terakhir, harus menjalani tes virus korona," lanjut perintah pencegahan tersebut. ● tom

Presiden Nepal Bubarkan Parlemen, Janjikan Pemilu

KATHMANDU (IM) - Presiden Nepal Bidhya Devi Bhandari pada Minggu membubarkan parlemen menyusul rekomendasi dari Kabinet dan mengumumkan pemilihan umum diadakan pada tahun depan. Bhandari menyetujui rekomendasi Kabinet sesuai dengan

konstitusi Nepal, kata juru bicarannya Badrinath Adhikari dalam sebuah pernyataan.

Dia juga mendukung proposal Kabinet untuk mengadakan pemilihan umum dalam dua tahap pada 30 April dan 10 Mei tahun depan. Langkah politik itu menyusul meningkatnya perseteruan faksi di

Partai Komunis Nepal yang berkuasa, yang mulai berkuasa pada Februari 2018.

Partai berkuasa, yang muncul setelah penggabungan mantan Maois dan faksi komunis moderat, memperoleh hampir dua pertiga mayoritas dalam pemilihan umum pada akhir 2017. Tetapi para pe-

mimpin di partai berkuasa mengalami perpecahan yang dalam, menyebabkan frustrasi di antara orang-orang yang mengharapkan stabilitas politik setelah terjadi kekacauan bertahun-tahun.

Pakar konstitusi mengatakan konstitusi negara Himalaya itu tidak memiliki ke-

tentuan jelas untuk membubarkan parlemen. Langkah tersebut diperkirakan akan digugat di Mahkamah Agung negara itu.

Pengamat politik mengatakan perkembangan politik hari Minggu akan menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik. ● ans

Serangan Bom Mobil, 9 Anggota Parlemen Afghanistan Tewas

KABUL (IM) - Pemerintah Afghanistan mengatakan bom mobil yang meledak di Kabul, Minggu (21/12) menewaskan sembilan orang. Mereka mengatakan, bom itu tampaknya mengincar Anggota Parlemen Nasional Khan Mohammad Wardak.

Voice of America melaporkan Wardak selamat dari serangan tersebut, ia dan 20 orang lainnya mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Massoud Andarabi yang mengunjungi lokasi serangan mengatakan motif serangan masih diselidiki.

"Beberapa korban adalah perempuan dan anak-anak," kata Menteri Dalam Negeri Afghanistan Massoud Andarabi. Sejauh ini, belum jelas apakah bom itu ditanam di mobil yang diparkir di rute yang dilewati anggota DPR itu atau bom ditanam di mobil yang diledakkan oleh pegebom.

Andarabi mengatakan, pemerintah masih mencari tahu apakah serangan ini terkait dengan serangan bom bunuh diri. Taliban maupun kelompok bersenjata yang lain belum mengklaim serangan bom mematikan ini. Namun, Andarabi mengarahkan jaringnya ke Taliban. "Kami tahu siapa musuhnya, dan kami tahu rencana mereka," katanya.

Wardak merupakan seorang pengusaha yang terkenal dan anggota parlemen Afghanistan kedua yang diserang pada ini. Pada 13 Desember lalu mobil yang membawa anggota parlemen Tofeq Wahdat diserang bom.

Sopir dan pengawalnya meninggal dunia sementara Wahdat selamat dalam serangan yang juga melukai saudara

laki-lakinya itu. Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Serangan-serangan terhadap tokoh-tokoh Afghanistan beberapa pekan terakhir telah menewaskan belasan orang termasuk seorang pejabat senior pemerintah. Sebagian besar tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangkaian serangan tersebut.

Sejak perwakilan pemerintah Afghanistan dan Taliban menggelar perundingan damai di Qatar. Kekerasan di negara Timur Tengah itu meningkat tajam.

Pasukan keamanan Afghanistan dan pemberontak Taliban masih bertempur di seluruh negeri. Pertempuran itu tidak hanya menewaskan kombatan tapi juga banyak warga sipil.

Aksi teror itu terjadi di tengah negosiasi damai antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Keduanya bertemu demi mengakhiri perang saudara, yang telah berlangsung hampir 20 tahun.

Kementerian Dalam Negeri Afghanistan melalui pernyataan tertulisnya mengatakan Taliban bertanggung jawab atas tewasnya 487 warga sipil dalam tiga bulan terakhir.

Taliban diyakini sebagai pihak yang dalam masa itu melancarkan 35 aksi bunuh diri dan 507 serangan bom di seluruh negeri hingga mengakibatkan 1.049 orang luka-luka.

Negosiasi yang disebut perundingan antar-Afghanistan itu dilakukan untuk mengakhiri konflik lama di negara itu. Tapi sejak digelar bulan September lalu perundingan ini mengalami kebuntuan. Perundingan dihentikan sementara dari 14 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021. ● gul

50 Badan Pemerintah AS Terpengaruh Serangan Siber Besar-besaran

WASHINGTON (IM) - Perusahaan keamanan dunia maya yang mengidentifikasi peretasan skala besar terhadap lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan serangan siber itu benar-benar mempengaruhi sekira 50 organisasi.

Kevin Mandia, CEO FireEye, mengatakan bahwa sementara sekira 18.000 organisasi memiliki kode berbahaya di jaringan mereka, dan 50 organisasi tersebut yang mengalami pembobolan masif.

Departemen Keuangan AS dan departemen keamanan dalam negeri, departemen luar negeri, dan departemen pertahanan diketahui telah menjadi sasaran.

Kepada CBS News, Mandia mengatakan bahwa serangan siber itu "sangat konsisten" dengan apa yang diketahui pejabat AS tentang pekerjaan badan intelijen luar negeri Rusia, SVR.

"Saya pikir ini adalah orang-orang yang kami tanggapi di tahun 90-an, di awal tahun 2000-an. Ini adalah permainan yang berkelanjutan di dunia maya," katanya sebagaimana dilansir BBC.

Dia mengatakan serangan terhadap perusahaan manajemen teknologi informasi (TI) berbasis di Texas, SolarWinds Orion, yang menjadi 'perangkat' sumber peretasan, memperlihatkan bukti paling awal bahwa "serangan ini telah direncanakan".

Ini dimulai dengan "uji coba" pada Oktober 2019 ketika "kode tidak berbahaya" di dalam rantai pasokan," katanya. "Yang dimaksudkan ke sana dan itu adalah pintu belakang (backdoor) yang berdampak pada semua orang".

Peretas berhasil mendapatkan akses ke organisasi besar dengan meretas perangkat lunak manajemen jaringan yang dikembangkan oleh SolarWinds.

Akses tersebut dapat memungkinkan para peretas untuk mengambil kendali tingkat tinggi atas jaringan organisasi yang menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi tampaknya telah digunakan untuk mencuri data

daripada untuk dampak yang mengganggu atau merusak.

Terlepas dari penolakan Rusia atas klaim "tak berdasar", banyak komunitas intelijen AS mencurigai pemerintah Rusia yang bertanggung jawab.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyalahkan Rusia atas peretasan tersebut, begitu pula dengan para ketua Senat dan komite intelijen DPR. "Kami dapat mengatakan dengan cukup jelas bahwa Rusia-lah yang terlibat dalam aktivitas ini," kata Pompeo pada Jumat (18/12). Dia mengatakan bahwa Rusia sedang mencoba untuk merusak cara hidup orang Amerika, dan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin "tetap merupakan risiko yang nyata". Namun, dalam dua cuitan pada Sabtu (19/12).

"Peretasan Cyber jauh lebih hebat di Media Berita Palsu daripada di kenyataan," cuit Trump. Sementara itu Presiden terpilih AS, Joe Biden telah berjanji untuk menjadikan keamanan siber sebagai prioritas utama pemerintahannya setelah dia dilantik pada 20 Januari 2021 mendatang. ● tom



PAMERAN NATAL DI UKRAINA

Boneka beruang dengan masker pelindung terlihat di pameran Natal di pusat Kyiv, Ukraina, Minggu (20/12).

Korsel Batasi Pertemuan 5 Orang Selama Libur Natal

SEOUL (IM) - Pertemuan lima orang atau lebih akan dilarang di wilayah Ibu Kota Seoul, Korea Selatan (Korsel) selama liburan Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu dikeluarkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) yang menyebabkan infeksi penyakit Covid-19.

Aturan akan diberlakukan dalam dua hari mendatang, yaitu mulai Rabu (23/12) hingga 3 Januari 2021. Korsel melaporkan jumlah kasus harian tertinggi serta kematian pada Senin (21/12).

Secara keseluruhan, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mengatakan

jumlah kematian di Korsel adalah 698. Sementara, jumlah kasus Covid-19 terbaru di negara itu mencapai 926.

Termasuk di antara 892 kasus Covid-19 terbaru di Korsel berasal dari penularan lokal. Jumlah kasus virus corona jenis baru secara keseluruhan di negara itu adalah 50.591.

Korsel telah mengalami peningkatan kasus Covid-19, yang dikhawatirkan oleh pihak berwenang berpotensi sebagai gelombang baru wabah. Negara itu juga melaporkan lebih dari 1.000 kasus harian terbaru selama lima hari berturut-turut dalam satu pekan terakhir. ● gul



KEJUARAAN DUNIA SKI JUMPING

Pemain ski asal Austria Philipp Aschenwald bertanding dalam Kejuaraan Dunia Ski Jumping di Engelberg, Swiss, Minggu (20/12).

Tim Kampanye Trump Kembali Minta MA AS Batalkan Hasil Pemilu

WASHINGTON (IM) - Tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan kembali meminta Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan hasil pemilihan pada 3 November lalu, yang menunjukkan kekalahan dari kandidat pejabat ini. Langkah tersebut merupakan upaya terbaru untuk memenangkan pemilihan AS meski hasil resmi dari Electoral College telah dirilis.

Hasil resmi menyatakan kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden sebagai presiden terpilih. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh tim kampanye Trump pada Minggu (20/12), pengacara Rudy Giuliani mengatakan pihaknya telah mengajukan petisi. Petisi tersebut meminta pengadilan untuk membatalkan tiga putusan oleh pengadilan negara bagian Pennsylvania, yang menafsirkan aturan negara bagian untuk surat suara.

Petisi Kampanye berusaha untuk membatalkan tiga keputusan yang menghapus perlindungan Badan Legislatif Pennsylvania terhadap kecurangan surat suara," ujar Giuliani dalam sebuah pernyataan dilansir The New Daily, Senin (21/12).

Giuliani mengatakan pengajuan petisi ditujukan untuk mencari opsi dari 'pemulihan yang tepat'. Termasuk di antaranya adalah melalui perintah yang memungkinkan badan legislatif Pennsylvania untuk memberikan 20 suara elektoral kepada Trump.

Biden mendapatkan lebih dari 80 ribu suara di Pennsylvania. Meski demikian, Joshua Douglas, seorang profesor di bidang hukum pemilu di University of Kentucky mengatakan petisi itu bersifat sembrono dan tidak akan menghentikan Biden dilantik menjadi presiden pada 20 Januari 2021.

"Pengadilan akan segera menutupnya," jelas Douglas.

McConnell telah menolak gagasan untuk membatalkan pemilihan presiden 2020 di Kongres. Seorang kandidat dalam pemilihan presiden AS membutuhkan 270 suara dari Electoral College untuk melangkah ke Gedung Putih.

Biden memenangkan 306 suara tersebut, sementara Trump dengan 232 suara. Kongres AS akan menghitung suara elektoral pada 6 Januari 2021.

Trump telah membuat sejumlah klaim yang tidak berdasar tentang kecurangan pemilu. Pria berusia 74 tahun ini menentang hasil suara di banyak negara bagian. Dia juga dinilai telah menekan pejabat negara, anggota parlemen, dan gubernur untuk menolak hasil suara dan menyatakan dirinya sebagai pemenang. ● gul